

PELAKSANAAN STRATEGIC INVESTMENT ACTION PLAN (SIAP) DALAM IKM KOMPONEN OTOMOTIF DI JAWA BARAT TAHUN 2005-2014

Azizatun Nahdliyah¹
NIM. 1102045046

Abstract

Strategic Investment Action Plan (SIAP) in one of cooperation programs between Japan and Indonesia who agreed by the highest officials of the both countries in 2005. The purpose of this study was to describe the implementation of SIAP to competitiveness Small and Medium Enterprises (SMEs) especially automotive components. Type of research where the author tries to describe Japan investment in Indonesia through social economy, like as how to development SMEs automotive components and develop the human resources including in West Java. The data used in the research are primary and secondary data. The analysis of qualitative technique is used to analyze the data. The result showed that at 2014 the program SIAP most have been implemented by the governments (Ministry of Industry, Ministry of Trade and related parties), the private sectors, and the persons of SMEs to the development automotive components with small and medium scale in West Java, that be able contend in local and international markets. This is evident from the various types of training and workshops conducted to staff / employ structural, the private sectors and perpetrators SMEs automotive components.

Keywords : *SIAP, SMEs Automotive Components, West Java*

Pendahuluan

Industri pengolahan merupakan industri yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang di era tahun 2000an. Industri pertumbuhan yang diprioritaskan untuk diperkuat daya saingnya selain industri agro yaitu industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi antara lain industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri elektronik dan industri kendaraan bermotor.

Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2003, industri kendaraan bermotor atau industri otomotif dan komponen otomotif merupakan salah satu klaster industri unggulan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 7%. (Peluang dan Tantangan Industri Komponen Otomotif Indonesia. 2008) Pada tahun 2004, lebih dari 36 perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor baik R-4 dan R-2. Masing-masing merakit sekitar 40 merek R-4 dan 12 merek R-2. Merek

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Email : hyun_azizah@yahoo.co.id

kendaraan yang diproduksi seperti Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki, Daihatsu, Nissan, Hino dan lainnya. (Perkembangan Daya saing Industri otomotif, Elektronika dan Alat Berat. Laporan Studi 2007) Kemudian untuk produksi kendaraan bermotor R-4, terus meningkat sejak tahun 2003 mencapai 322.035 unit, tahun 2004 sebanyak 422.099 unit dan tahun 2005 sebanyak 500.710 unit. Sementara produksi kendaraan bermotor R-2 juga mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi, dimana pada tahun 2003 mencapai 2,8 juta unit, tahun 2004 sebanyak 3,8 juta unit dan tahun 2005 sebanyak 5,1 juta unit, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produksi Kendaraan Bermotor

Tahun	Produksi KBM R-4	Pertumbuhan	Produksi KBM R-2	Pertumbuhan
2003	322.035	7,60%	2.318.238	21,39%
2004	422.099	31,07%	3.897.250	38,49%
2005	500.710	18,62%	5.113.487	31,02%

Sumber : Departemen Perindustrian

Tingginya permintaan pasar yang semakin meningkat, membuat produksi otomotif juga semakin meningkat. Industri perakitan kendaraan bermotor memasok komponen otomotif harus dengan spesifikasi dan persyaratan mutu yang ditentukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Untuk komponen utama berupa *power train* seperti mesin, transmisi, *axle* umumnya dibuat langsung oleh ATPM karena sangat terkait peformasi dari merek dan jenis kendaraan. Industri komponen otomotif di Indonesia mencapai kurang lebih 250 perusahaan dengan skala besar dengan komposisi 80% bergerak di komponen R-2 dan 20% komponen R-4. Kapasitas terpasang industri komponen baru mencapai 150 item atau sekitar 40% sampai 50% dari seluruh komponen kendaraan lokal dan sebagian besar merupakan komponen impor. (Perkembangan Daya saing Industri otomotif, Elektronika dan Alat Berat. Laporan Studi 2007). Sementara untuk industri berskala kecil dan menengah hanya memasok komponen layer 2 dan layer 3 (komponen *After Market*) yang merupakan komponen suku cadang pengganti untuk dipasarkan di pasar bebas dalam negeri.

Seperti perusahaan Jepang yang mengoperasikan industrinya di Indonesia yaitu PT. Astra Daihatsu Motor yang tergabung dalam Astra Grup melakukan investasi sebesar US\$ 80 Juta untuk menambah kapasitas produksinya dari 114.000 unit/tahun menjadi 180.000 unit/tahun, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) dan PT. Toyota Boshoku Indonesiayang bergerak di bidang komponen otomotif. (Perkembangan Daya saing Industri otomotif, Elektronika dan Alat Berat. Laporan Studi 2007). Dengan demikian, industri-industri besar tersebut membuat *multiflier effects* atas kemunculan IKM pada sektor komponen otomotif dan mampu menjadi sektor yang layak untuk dikembangkan.

Namun, berkembangnya IKM di Jawa Barat tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang sering kali muncul. Dari sisi internal, terkait masalah kurangnya kemampuan untuk memenuhi persyaratan *Quality, Cost and Delivery (QCD)*. Hal ini disebabkan karenaterbatasnya kemampuan SDM untuk mengelola teknologi kunci

yang juga sebagai pendukung industri. QCD pada komponen otomotif sangat dibutuhkan agar mampu berdaya saing, baik itu pasar lokal maupun internasional. Sementara dari sisi eksternal, pelaku IKM merasakan kendala seperti banyaknya produk impor yang memenuhi pasar komponen otomotif. Hal tersebut di picu oleh naiknya harga bahan baku (aluminium, biji besi baja dan komponen karet) yang kemudian tidak diimbangi dengan peningkatan harga produk. Salah satu negara pengimpor komponen otomotif adalah Jepang. Banyaknya jumlah industri perakitan otomotif asal Jepang membuat Jepang juga ikut mengimpor komponen yang dibutuhkan oleh perusahaannya di dalam negeri khususnya di Jawa Barat, salah satu alasannya karena komponen dalam negeri dianggap belum sesuai dengan standarisasi pemilik industri.

Berbagai permasalahan yang telah disebutkan, pemerintah Indonesia melalui instansi resmi dan swasta melakukan berbagai upaya baik itu melalui domestik maupun internasional. Pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi dilantik menjadi kepala dan wakil kepala pemerintahan, pemerintahan kemudian membuat berbagai program pengembangan perekonomian Indonesia, khususnya dibidang UKM. Untuk membangun upaya perbaikan iklim investasi, pada akhir bulan Mei 2005, pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati tahap perundingan upaya pembentukan sebuah rencana aksi strategi investasi. Forum tersebut merancang apa yang disebut dengan Rencana pelaksanaan Investasi Strategis Indonesia-Jepang (*Strategic Investment Action Plan / SIAP*). SIAP diumumkan pertama kali di Tokyo, pada tanggal 2 Juni 2005, sebagai suatu inisiatif kerjasama Jepang-Indonesia untuk mendorong investasi asing. Bentuk kerjasama ini didasarkan pada Pertemuan Tingkat Tinggi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan perdana Menteri Koizumi pada 20 November 2004. SIAP yang berisikan 118 aktifitas dan program kemudian dibagi menjadi 4 kelompok kerja dalam bidang, yaitu:

1. Bidang pajak atau bea cukai
2. Bidang tenaga kerja
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang persaingan usaha kecil dan menengah/IKM

Dari 4 bidang prioritas dalam SIAP, salah satu bidang yang dimuat adalah daya saing industri/IKM. Implementasi kelompok kerja di bidang tersebut kemudian menargetkan beberapa hal penting yang hendak di capai yaitu menyiapkan strategi pengembangan industri untuk memperkuat daya saing industri kecil. Selain itu hal yang menjadi perhatian pencapaian pada bidang daya saing IKM adalah mendorong industri pendukung agar mampu mengambil peluang pasar dan memperkuat pelayanan umum BKPM terhadap investor dalam hal ini investor yang melakukan investasi dibidang komponen otomotif yaitu Jepang. Salah satu fokus bantuan terhadap Indonesia adalah Pembinaan SDM pelaku IKM Industri otomotif yang berfokus pada pengembangan IKM komponen otomotif. Sebagai kerangka prioritasnya, telah ditetapkan 10 item yang salah satunya adalah "Strategi Pengembangan Industri Pendukung" dan telah diusulkan strategi dan kebijakan memperkuat daya saing IKM.

Dari seluruh kebijakan mengenai daya saing industri/UKM merupakan upaya lanjutan dari kerjasama yang dilakukan Jepang dan Indonesia. Langkah selanjutnya untuk mempermudah dalam mengevaluasi dari setiap kebijakan yang di buat, pemerintah beserta tim yang terkait membuat sebuah survei terhadap pengembangan SDM dengan tujuan untuk mensinergikan pembinaan konsultan IKM oleh Proyek Kerjasama Teknologi dan membuat usulan rencana (scheme) untuk mengembangkan Program Pembinaan SDM Industri ke daerah sambil tetap mempertimbangkan Pendirian Pusat Pembinaan SDM IKM di masa depan. Survei dilaksanakan dengan sasaran Pemerintah Pusat (Deperin) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Namun untuk Pemprov, sasaran survei ini adalah Provinsi Jawa Barat. Karena jenis usaha yang menjadi sasaran survei ini banyak berkumpul di sekitaran provinsi tersebut. Sebelumnya, Deperin diperintahkan membagi skala perusahaan sasaran survei berdasarkan jumlah pekerja dan nilai investasi, yaitu perusahaan yang memiliki nilai investasi 1 Miliar s/d 10 Miliar dan jumlah pekerja kurang dari 100 orang. Hal ini kemudian membuat penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi SIAP terhadap daya saing IKM komponen otomotif di Jawa Barat tahun 2005-2014.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Implementasi

Implementasi adalah seperangkat aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan. Menurut Harsono, implementasi diartikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. George C. Edwards III memberikan pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. (Eny Rahmaningsih, 2014 :5)

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : *staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies*.

3. Disposisi

Menurut Edward III mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para

pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Birokrasi

Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Konsep Daya Saing Industri

Menurut Porter, "*competition is at the core of the success or failure of firms*". Persaingan adalah inti dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan. (Riswanda Imawan. *Peningkatan Daya Saing*. 2001). Terdapat dua sisi yang ditimbulkan oleh persaingan, yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan terbaik. Dimensi daya saing suatu perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Muhardi yaitu terdiri dari biaya (*cost*), kualitas (*quality*), waktu penyampaian (*delivery*), dan fleksibilitas (*flexibility*). Keempat indikator tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut (Wiyadi. *Pengukuran Indeks Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM) Di Jawa Tengah*. Jurnal Siasat Bisnis. Melalui : Jurnal.uii.ac.id):

- a. Biaya adalah dimensi daya saing operasi yang meliputi empat indikator yaitu biaya produksi, produktifitas tenaga kerja, penggunaan kapasitas produksi dan persediaan.
- b. Kualitas merupakan dimensi daya saing yang juga sangat penting, yaitu meliputi berbagai indikator diantaranya tampilan produk, jangka waktu penerimaan produk, daya tahan produk, kecepatan penyelesaian keluhan konsumen dan kesesuaian produk terhadap spesifikasi desain.
- c. Waktu penyampaian merupakan dimensi daya saing yang meliputi berbagai indikator diantaranya ketepatan waktu produksi, pengurangan waktu tunggu produksi dan ketepatan waktu penyampaian produk.
- d. Adapun fleksibilitas merupakan dimensi daya saing operasi yang meliputi berbagai indikator diantaranya macam produk yang dihasilkan, kecepatan menyesuaikan dengan kepentingan lingkungan.

Selain beberapa indikator yang dijelaskan diatas, beberapa faktor juga yang mempengaruhi daya saing yaitu *Pertama*, lokasi. Lokasi usaha yang strategis akan menarik perhatian konsumen. Letak atau lokasi akan menjadi sangat penting untuk memenuhi kemudahan pelanggan dalam berkunjung, konsumen tentu akan mencari

jarak tempuh terpendek. *Kedua*, harga. Harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Faktor harga juga berpengaruh pada konsumen untuk mengambil keputusan hingga kebijakan penjualan. *Ketiga*, mutu atau kualitas. Kualitas produk ditunjukkan oleh kesesuaian spesifikasi desain dengan fungsi atau kegunaan produk itu sendiri dan juga kesesuaian produk dengan spesifikasi desainnya. Jadi suatu perusahaan memiliki daya saing apabila perusahaan itu menghasilkan produk yang berkualitas.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe deskriptif dimana akan menggambarkan investasi Jepang di Indonesia melalui sosial ekonomi seperti bagaimana pengembangan industri kecil dan menengah, serta mengembangkan SDM di Indonesia melalui kerangka SIAP. Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa naskah *MoU Strategic Investment Action Plan* (SIAP), dokumen 5 kerangka program kerjasama SIAP dan beberapa hasil laporan dari kejasama Indonesia dan Jepang. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Penulis mendapatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersil maupun non-komersil. Seperti menggunakan data hasil riset dari buku, surat kabar, majalah, website dan lain-lain.

Hasil Penelitian

Terdapat 4 kelompok bidang kerja dalam SIAP salah satunya yaitu daya saing industri dan pengembangan IKM khususnya sektor industri pengolahan komponen otomotif. Bidang daya saing IKM di Jawa Barat dianggap salah satu prioritas mengingat Jawa Barat merupakan kawasan industri nasional. Oleh karena itu memberikan potensi bagi masyarakat setempat untuk dapat bermitra dan bekerjasama dengan perusahaan besar khususnya di bidang otomotif.

Pelaksanaan Program Kerjasama Strategic Investment Action Plan (SIAP) di Bidang Daya Saing IKM

1. Sosialisasi SIAP Kepada Pelaku IKM Komponen Otomotif

Pada kerangka implementasi kebijakan SIAP di bidang daya saing IKM, disebutkan yaitu melindungi hak kepemilikan intelektual di dalam pasar domestik. Kemudian Kementerian Hukum & HAM bersama Kemenperin serta perwakilan dari JICA melakukan pengembangan sistem berbagi informasi untuk menyalurkan informasi, baik itu kepada pihak pemerintah, swasta dan pelaku IKM. Sehingga, media informasi dan asosiasi gabungan pihak swasta sangat berperan untuk menghasilkan pemahaman yang relevan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat serta pihak yang terkait.

- a. Penyaluran informasi. Implementasi suatu kebijakan yang sesuai melalui bagaimana menyalurkan komunikasi dengan baik. Pada proses penyaluran komunikasi, didukung oleh struktur birokrasi yang baik dan sederhana. Selain itu komunikasi yang baik juga menghasilkan proses kebijakan yang sesuai dengan target, baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, masyarakat Jawa Barat juga dituntut untuk memahami sistem birokrasi yang sesuai, agar memperoleh informasi yang lengkap dan baik. Penyaluran komunikasi mengenai daya saing komponen otomotif yang

diupayakan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang dapat dilakukan melalui *Website* dan *Seminar/Workshop*. Pasca penandatanganan MOU SIAP di pertengahan tahun 2005, Kementerian Perdagangan bersama dengan perwakilan *Japan External Trade Organization* (JETRO) mengadakan seminar mengenai investasi di Jepang. Aksi ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan salah satu program dari Promosi Industri Pendukung (*Supporting Industry Promotion/SIP*) dalam bidang daya saing IKM. Seminar tersebut sasarannya adalah para pengusaha yang berasal dari Jepang khususnya pengusaha komponen otomotif. Pada tahun 2007 beberapa kali dilaksanakan *Workshop* mengenai sosialisasi pembinaan SDM IKM di Jawa Barat, mengenai model-model program pembinaan SDM IKM dan laporan-laporan yang memuat informasi-informasi penting. Sasaran dari *Workshop* ini adalah lembaga-lembaga/badan pemerintahan yang terkait (Pemerintah Pusat, Disperindag Pemerintah Provinsi Jawa Barat), industri pengolahan dan Ditjen IKM Departemen Perindustrian.

Selain penjelasan di atas, Gabungan / Asosiasi juga salah satu aktor penting dalam membangun komunikasi. Pada kerjasama SIAP setidaknya ada 4 kelompok gabungan yang ditunjuk sebagai pembuat hingga pelaksana kebijakan implementasi SIAP, antara lain : *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Japan External Trade Organization* (JETRO), *Jakarta Japan Club* (JJC) dan Asosiasi Gabungan Industri Bermotor (GAIKINDO).

- b. Ketetapan pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Barat hingga struktur visi dan misi Disperindag
Kejelasan komunikasi harus dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap kebijakan. Untuk itu pada bidang daya saing IKM, analisis di lapangan diperlukan sebagai tahap pertimbangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakannya. Yang mana, pada bulan Juli tahun 2005, Kementerian Perdagangan (KADIN bekerjasama dengan JETRO) melakukan analisis daya saing pada produk komponen otomotif dalam negeri. Selanjutnya institusi tersebut mengatur ulang timnya untuk melakukan survei terhadap sejumlah produk IKM. Survei tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk penyesuaian, baik itu pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apabila mengacu pada *Medium-Term Development Plan 2004-2009 : government regulation No.7/2005* (RPNJM 2004-2009), rencana ini memiliki posisi sebagai rencana kegiatan jangka menengah untuk pengembangan IKM, sehingga menjadi dasar rencana tertinggi nasional dalam pengembangan IKM. rencana tersebut memiliki 3 target yaitu : Perbaikan iklim ekonomi, Meningkatkan produksi ekonomi nasional dan Meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk mencapainya perlu mempersiapkan infrastruktur yang tepat, menghidupkan ekonomi daerah, fokus terhadap industri pengolahan, memperkuat IKM dan kepastian hukum di dunia usaha. Hal ini kemudian membuat pemerintah pusat menyusun kebijakan dengan menyesuaikan rencana dan target yang hendak di capai.

Sementara pada Pemerintah provinsi daerah (Jawa Barat) melalui Disperindag menetapkan sebuah visi tahun 2006 s/d 2010 yaitu “Peningkatan daya saing”. Kemudian misi dari Disperindag Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu :

- 1) Penguatan struktur industri melalui peningkatan produktifitas dan peningkatan nilai produk, penguatan Kerjasama antar sub sektor, perusahaan besar dan IKM dan antar wilayah industri serta memperkuat kontribusi IKM.
- 2) Pengembangan pasar dalam negeri dan perlindungan terhadap konsumen memajukan 4 sentra yaitu tekstil dan produk tekstil, alas kaki, komponen otomotif dan mebel.
- 3) Memajukan perdagangan baik itu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri hingga ekspor produk dalam negeri.
- 4) Memperkuat organisasi Disperindag, peningkatan kemampuan SDM pegawai, penguatan sarana dan prasarana, pembangunan sistem informasi, dll.

2. Pemanfaatan Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*Intangible*). Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi.

1. Staf

Pada program pembinaan SDM yang dilakukan oleh Deperin terbagi menjadi 3, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (PUSDIKLAT-IND), Ditjen IKM Departemen Perindustrian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), (Departemen Perindustrian, 2008). Ketiga lembaga ini melakukan pelatihan terhadap staf dan pegawai, baik itu di badan pemerintahan, pihak swasta serta pelaku IKM itu sendiri. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mengimplementasikan kebijakan agar dapat terlaksana sesuai dengan target. Pada tahun 2006, PUSDIKLAT-IND telah melaksanakan beberapa program pelatihan bagi pegawai di lingkungan Departemen, pegawai BUMN dan industri swasta, termasuk beberapa pelatihan bagi pengajar. Jumlah peserta suatu program paling sedikit 30 orang. Melalui pelatihan juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan dengan pegawai pemerintahan, pegawai BUMN dan industri swasta. Karena itu sasaran pelatihan tidak selalu di khususkan untuk satu lembaga saja, melainkan peserta juga banyak berasal dari industri kecil dan menengah. Ditjen IKM adalah lembaga yang melakukan penetapan kebijakan pengembangan IKM dan industri pendukung. Selain PUSDIKLAT-IND, Ditjen IKM juga merencanakan kebijakan dan melaksanakan pelatihan.

Selain pembinaan SDM oleh Deperin, pembinaan juga dilakukan dengan membuat sistem konsultasi IKM dan UPL-IKM. Dalam rangka membentuk sistem konsultasi IKM Indonesia yang baru, dengan merferensi kepada sistem *Shindan-shi* IKM di Jepang, maka tanggal 27 Juni 2006, Indonesia kemudian memberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian No 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi IKM. (Departemen

Perindustrian, 2008). Dalam peraturan tersebut prinsipnya adalah : 1) Perlu adanya pemberian jasa konsultasi untuk menemukan masalah yang dihadapi IKM dalam pembinaan dan perkembangannya serta membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, 2) Untuk itu, perlu adanya pembinaan tenaga khusus yang dapat memberikan jasa konsultasi tersebut.

Selain melalui sistem *Shindan-shi*, untuk menciptakan staf dan pegawai serta tenaga kerja yang profesional, pemerintah juga mengembangkan sistem pembinaan melalui pendidikan. Para lulusan SLTA, selain segera masuk ke lapangan kerja, ada dua pilihan lainnya yaitu melanjutkan ke jalur akademik di Universitas atau meneruskan ke jalur profesional di lembaga pendidikan kerja. Politeknik yang berada di bawah Departemen Pendidikan merupakan salah satu lembaga pendidikan kerja. Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Bandung terdapat 2 buah Politeknik. Politeknik tersebut yaitu Politeknik Manufaktur (POLMAN) dan Politeknik Bandung (POLBAN).

2. Kementrian Perindustrian (Kemenperin) sebagai otoritas penuh untuk pengembangan IKM

Dalam hal ini, Kementrian Perindustrian memiliki peran yang sangat besar untuk melaksanakan program kerjasama yang dilakukan oleh kedua kepala pemerintah Indonesia dan Jepang. Posisi Kemenperin sebagai otoritas dalam negeri pada kerjasama SIAP di bidang daya saing IKM ini harus dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Otoritas ini kemudian diharapkan dapat menguatkan kerjasama bahan baku bagi IKM dan mengatur ulang penyediaan bahan baku dalam negeri khususnya daerah Jawa Barat. Penguatan kerjasama bahan baku dilakukan dengan memanfaatkan potensi bijih besi yang berada di kawasan Tasikmalaya. Tasikmalaya memiliki pasir besi yang luas, dimana salah satu kegunaan pasir besi ini adalah sebagai bahan baku industri baja, sebagaimana yang telah diketahui bahwa komponen otomotif sebagian besar merupakan terbuat dari baja. Potensi bahan baku bijih besi di Jawa Barat berkapasitas mampu mencapai 3000 ton pasir besi per hari. Hingga tahun 2012 pasir besi di Jawa Barat mencapai 31.065.027 ton. (Kementrian Perindustrian RI, Profil Industri Baja, 2012 dalam www.kemenperin.go.id/download/7547/Profil-Industri-Baja). Potensi yang terdapat di Jawa Barat ini memang tidak banyak dibandingkan dengan pulau Kalimantan dan Sumatera, namun jika untuk memenuhi kebutuhan IKM komponen dengan skala kecil dan menengah, maka kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi. Seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum, bahwa salah satu hambatan IKM komponen otomotif di Jawa Barat yaitu tidak dioptimalkannya bahan baku yang ada dikarenakan Indonesia mengeksport bahan baku tersebut. Sehingga pasokan bahan baku dalam negeri menjadi berkurang. Bahkan sebagian IKM melakukan impor bahan baku untuk memproduksi komponen otomotif.

3. Peran Anggota *Shindan-shi* Sebagai Bagian Dari Implementasi Kebijakan SIAP

Shindan-shi memiliki peran yang cukup aktif dalam membina pelaku IKM di Jawa Barat. Kegiatan sebagai konsultan IKM khususnya komponen otomotif

difungsikan sebagai salah satu bagian penting terhadap jalannya program kerjasama. Selain itu, bonus atau insentif merupakan pemicu pelaksana kebijakan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

a. Pelatihan bagi anggota *Shindan-shi*

Seperti yang telah dijelaskan pada sistem *Shindan-shi* (sistem Konsultan Diagnosis IKM), bahwa Konsultan Diagnosis IKM merupakan pelaksana kebijakan pengembangan IKM, dimana untuk menempati posisi anggota tersebut, harus melalui kursus pelatihan Konsultan Diagnosis IKM selama 6 bulan dengan bukti kemampuan yang telah terdaftar di Ditjen IKM Departemen Perindustrian, berdasarkan SKKNI yang telah diterbitkan oleh LSP dan telah diakreditasi BNSP. Pada bulan April – Oktober 2006, Ditjen IKM Departemen Perindustrian menyelenggarakan kursus pelatihan Konsultan Diagnosis IKM angkatan I di Jawa Barat. Diantara pesertanya adalah Pegawai Disperindag tiap Pemerintah Daerah, Pejabat Fungsional Perindustrian dan Perdagangan (PFPP), Pegawai Balai Besar, dan beberapa lembaga daerah lainnya. Selama 6 bulan pelaksanaan, terdiri dari pelajaran teori termasuk manajemen keuangan, pembelian bahan, manajemen ketenagakerjaan, manajemen penjualan dan praktek tentang kontrol produksi pabrik.

Kemudian untuk sertifikasi, BNSP membentuk sistem Sertifikasi Kemampuan Profesi terhadap peserta Konsultan Diagnosis IKM yang telah melewati kursus pelatihan dan lolos dalam beberapa tahap tes. SKKNI menetapkan bahwa kemampuan dibagai atas pengetahuan, keterampilan teknis dan sikap. Sistem sertifikasi ini kemudian dapat digunakan sebagai syarat untuk dapat bergabung dalam sistem Konsultan Diagnosis IKM dan UPL-IKM. Karena berdasarkan instruksi Direktur Jendral IKM, surat bulan November 2006 (717/IKM/1/11/2006) mengenai instruksi pembentukan UPL-IKM terhadap Disperindag Kabupaten/Kota, anggotanya merupakan anggota PFPP dan pegawai yang telah mengikuti kursus Konsultan Diagnosis IKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendampingan kepada sentra daerah dan IKM.

b. Insentif kepada anggota *Shindan-shi*

Pada sisi disposisi, insentif merupakan salah satu hal penting untuk mendorong motivasi dan mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Proses pendampingan terhadap IKM, bukan tidak mungkin peran *Shindan-shi* mengalami kekurangan pada bidang-bidang tertentu. Dengan tingginya kebutuhan jasa ini, perlu di buat mekanisme yang mendukung berkelanjutannya kegiatan ini dan pemberian insentif bagi *Shindan-shi*. Untuk pemberian insentif, *Shindan-shi* mendapat program pelatihan ulang bagi anggota yang masih dianggap memiliki banyak kekurangan dalam melakukan pendampingan. Sehingga melalui program pelatihan ulang bagi *Shindan-shi* diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mendukung kurangnya pengalaman diagnosis atau pendampingan.

4. Pentingnya SOP Terhadap Pelaksana Kebijakan SIAP, Badan Pemerintahan dan Lembaga Swasta Terkait

Berdasarkan penjelasan pada teori dan konseptual, Edwards III memaparkan salah satu karakteristik utama dalam birokrasi adalah *Standard Operational Procedure* (SOP). Penerapan SOP pada program kerjasama daya saing IKM terlihat dari kepastian waktu, yakni target dimulai pada tahun 2005, dimana Badan Pelaksana SIAP bidang daya saing IKM beserta institusi terkait lainnya memulai tugasnya masing-masing, seperti menyusun Laporan Pembinaan SDM, membangun kapasitas untuk IKM di Indonesia khususnya Jawa Barat, baik dalam pemasarannya hingga pengemasan teknologi, membuat rancangan mengenai *Supporting Industry Promotion* (SIP) dan lain sebagainya.

Selain kepastian waktu, sumber daya dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi juga dituntut agar anggota dari Badan Pelaksana SIAP dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, mulai dari kepatuhan pegawai pelaksana, institusi-institusi terkait, sejumlah IKM komponen otomotif dan pemanfaatan potensi bahan baku otomotif yang ada di Jawa Barat mampu difungsikan dengan tepat. Dengan menggunakan SOP yang tepat, diharapkan seluruh elemen dan institusi terkait dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Kemampuan Daya Saing IKM Komponen Otomotif di Jawa Barat

Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas baik, sehingga persaingan dianggap merupakan sebagai peluang dan menjadi motivasi tersendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada konsep daya saing, beberapa dimensi daya saing suatu perusahaan yaitu terdiri dari biaya (*cost*), kualitas (*quality*), dan pengiriman (*delivery*) atau yang biasa disebut dengan QCD serta fleksibilitas.

- a. Bagi IKM komponen otomotif, biaya merupakan suatu hal dasar untuk bisa melakukan usaha. Pembiayaan mencakup modal sebagai pemenuhan bahan baku material, pengadaan alat-alat teknologi produksi, hingga pembiayaan tenaga kerja dan operasional lainnya. Biaya juga dapat menentukan bagaimana kualitas dari sebuah produk. Apabila pembiayaan bagi produksi OEM (*original*) memang lebih stabil dan tidak memerlukan biaya operasional yang tinggi, akan tetapi teknik tersebut mendapatkan keuntungan sedikit pula. Sementara untuk produk-produk AM yang sebagian besar diproduksi oleh IKM, memang diperlukan biaya operasional yang tinggi dan dana yang besar, namun persentase keuntungan juga besar. Untuk produksi, umumnya IKM memproduksi komponen otomotif dimulai dari layer 2 ke bawah, seperti berbagai jenis *stamping* logam, baja, plastik, *fiber polyster* dan berbagai jenis silinder untuk kebutuhan *sparepart* otomotif. Bagian-bagian ini kemudian di pasarkan pada pasar bebas.
- b. Selain biaya, dari segi kualitas juga menentukan suatu produk agar bisa berdaya saing. Untuk meningkatkan level produk dari layer bawah hingga produk *genuine*, IKM komponen otomotif harus meningkatkan kualitas barang produknya. Peran teknologi sangat penting untuk menentukan kualitas produk otomotif, sehingga antara modal dan teknologi memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu hasil survei yang dilakukan oleh JICA bekerjasama dengan Kemenperin dan

Disperindag terhadap IKM komponen otomotif di Jawa Barat yaitu lemahnya kualitas produk otomotif hingga manajemen industri, hal ini disebabkan karena kurangnya inovasi-inovasi dan penggunaan teknologi yang kurang memadai.(Rencana Pembinaan SDM IKM di Indonesia. 2008). Di sisi lain, pemerintah pusat mengintruksikan untuk membentuk Unit Pendamping Langsung (UPL-IKM) yang berdasarkan surat pada bulan Mei 2006 (325/IKM/V/06) di tiap provinsi. Program UPL-IKM dilaksanakan oleh Disperindag Jawa Barat, baik tingkat provinsi hingga kabuapten kota. Agenda dari program ini sebagian besar merupakan pembinaan terhadap pelaku IKM sebagai SDM hingga pelatihan secara teknis mengoperasikan teknologi.(Rencana Pembinaan SDM IKM di Indonesia. 2008)

- c. *Delivery* merupakan ketepatan waktu dalam pemesanan. Sama halnya dengan kualitas yang membutuhkan teknologi produksi yang bagus, *delivery* juga sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memproduksi suatu produk otomotif. Pengadaan bahan baku, keterampilan tenaga kerja dan lamanya waktu tunggu produksi menjadi sejumlah indikator untuk bisa berdaya saing. Selain itu, pengiriman produk dengan jarak yang jauh dapat mempengaruhi proses pengiriman. Untuk lebih efektif, Kemenperin memilih Jawa Barat sebagai wilayah strategis untuk membangun kawasan industri. Tercatat ada sekitar 2.381,97 hektar di wilayah utara Jawa Barat dan sekitar 35% berada di kabupaten Karawang, dan salah satu yang diprioritaskan yaitu industri otomotif.(Kemenperin : Pemerintah Fokus Membenahi Infrastruktur Jawa barat dalam : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6419/Pemerintah-Fokus-Membenahi-Infrastruktur-Jawa-Barat>)
- d. Indikator berikutnya agar bisa berdaya saing adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ditunjukkan dengan berbagai *variant* suatu produk yang dihasilkan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen.Oleh karena itu, melalui Kemenperin dan Disperindag Jawa Barat membantu pelaku IKM untuk bermitra dengan industri kendaraan bermotor, melakukan berbagai upaya peningkatan produksi yang inovatif dan mememanajemen pemenuhan kebutuhan pasar. Kegiatan tersebut berupa pameran otomotif yang melibatkan pengusaha-pengusaha otomotif Jepang di Indonesia dan pelatihan-pelatihan secara teknis yang sekaligus untuk melakukan transfer teknologi kepada IKM komponen otomotif di Jawa Barat.(Rencana Pembinaan SDM IKM di Indonesia. 2008)

Kesimpulan

Pada bulan Mei tahun 2005, telah dilakukan penandatanganan *Strategic Investment Action Plan* (SIAP) oleh Jepang dan Indonesia dan melaksanakan program kerjasama antara pihak Jepang dan Indonesia khususnya Jawa Barat.Salah satu kelompok kerjasama pada kerangka SIAP yaitu daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Hingga akhir tahun 2014 yang merupakan akhir masa kepresidenan SBY period ke 2, Salah satu kelompok kerjasama pada kerangka SIAP yaitu daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Selama proses pelaksanaan kebijakan, hambatan dan tantangan bermunculan seiring dengan pelaksanaannya. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) harus memiliki peran lebih banyak dalam melaksanakan program SIAP. Kemudian untuk kemampuan produk IKM khususnya produk dari

IKM komponen otomotif di Jawa Barat dikatakan cukup mampu berdaya saing, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang belum bisa dimanajemen dengan baik antara lain :

1. Kurangnya konsentrasi staf atau pegawai struktural yang bertugas di lapangan. Akibatnya, pencapaian misi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan instansi terkait tidak sesuai dengan harapan.
2. Pemanfaatan dan penggunaan SDA di Jawa Barat yang belum maksimal. Hal ini merupakan tugas pemerintah pusat agar dapat membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pelaku IKM juga dapat memanfaatkannya tanpa harus menambah daftar impor bahan baku serta memperoleh kemudahan untuk memulai usaha dengan modal yang terjangkau.
3. Penggunaan teknologi yang masih kurang dan mempengaruhi lemahnya QCD produk IKM komponen otomotif Jawa Barat. Hal ini kemudian menyebabkan lemahnya kualitas produk dan rendahnya minat pasar komponen otomotif.

Daftar Pustaka

Buku

Sharpe, F. William, Gordon J. Alexander and Jeffery V. Bailey. 1999. *Investasi*. Jakarta. Prenhallindo.

Web

Badan Pusat Statistik. Melalui : <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html#subjekViewTab1>. Diakses pada 16 Agustus 2015

Daftar Perjanjian Internasional, terdapat di http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&Treaty_page=151&sort=signed_date.pdf. Diakses pada 12 Desember 2014

Deperin RI. *Survei rencana pembinaan SDM industri kecil dan menengah di indonesia. Laporan akhir, february 2008*. dalam : <http://open.jicareport.jica.go.jp/pdf/11876059.pdf>. Hal. 5-19 diakses pada 06 Oktober 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Dalam : www.disperindagjabar.go.id diakses pada 20 September 2017

Fadi Rahman. Teori Implementasi. Dalam : <http://www.umpalangkaraya.ac.id/perpustakaan/digilib/files/disk1/1/123-dfadf-rahmanfadi-39-5-20.adna-4.pdf>. Diakses pada 25 April 2017

Industri. Dalam : <http://perwakilan.jabarprov.go.id/artikel/11/industri> diakses pada 01 Oktober 2015

Jawa Barat Disiapkan Menjadi Kawasan Industrimelalui : <http://nasional.kontan.co.id/news/jawa-barat-disiapkan-menjadi-kawasan-industri>. Diakses pada 21 Juli 2017

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. *Press Release 2005*. Melalui :<http://www.id.emb-japan.go.jp/news2005.html>. Diakses pada 24 November 2014

Kemenperin Dorong Perkembangan Ikm Komponen Otomotif Nasional. Dalam: http://www.jabarprov.go.id/index.php/newa/5568/Kemenperin_Dorong_Perkembangan_IKM_Komponene_Otomotif_Nasional Diakses pada 12 Mei 2017

Kementerian Perindustrian RI. *Profil Industri Baja*. 2012. dalam www.kemenperin.go.id/download/7547/Profil-Industri-Baja. diakses pada 5 September 2017

Laporan Studi 2007. *Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat*. Melalui :www.kemenperin.go.id/Laporan-Studi-2007/Pdf

Pelatihan Khusus Takumi. Dalam :<http://sharp-indonesia.com/karawangfactory/pages/2/takumi-philosophy>, diakses pada 15 Oktober 2015.

Perkembangan Industri otomotif. Dalam :www.gaikindo.or.id/perkembangan/. Diakses pada 24 Juli 2017

Wiyadi. *Pengukuran Indeks Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM) Di Jawa Tengah*. Jurnal Siasat Bisnis. Melalui :jurnal.uii.ac.id/JSB/article/viewFile/2015/1769. Diakses pada 12 Februari 2018

Jurnal

Dewayana, Triwulandari, dkk. *Peluang dan Tantangan Industri Komponen Otomotif di Indonesia*. Vol 1. No.2. 2012

Eny Rahmaningsih. *Implementasi Kebijakan Pembuatan Elektronik-KTP di Kecamatan Pontianak Utara*. Vol 3 No. 4. 2014. 4

Hanif Scholachuddin. *Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Impelemntasi Kebijakan Kurikulum 2013)*. Vol.02 No.2 2014

Kacung Marijan. *Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Kluster*. Vol 7. No 3. Desember 2005. 3

Riswandha Imawan. *Peningkatan Daya Saing : Pendekatan Paradigmatik-Politis-Globalisasi*. Vol 6.No 1. 2002